

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Basah, Sjachran. 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 1989. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Zairin. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- . 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, ST dan Moh Mahfud. MD. 2000. *Pokok-pokok Administrasi Negara*. Yogyakarta:Liberty.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya dalam Pengadilan oleh Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Menyongsong Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Makalah Diskusi Mahasiswa Semarang “LOMBROSSO”*
- Situmorang, Victor dan Soedibyo. 1992. *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soegijatno, Tjakranegara R. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, Agus Budi. 2006. *Perbuatan Hukum Publik Yang Melanggar Hukum Dapat Digugat ke Pengadilan Administrasi*. Yogyakarta: Ar Ruzz.

- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Wijoyo, Suparto. 2005. *Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wiyono, R.. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomo 2)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Polri;

Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor 78/G2015/PTUN-MDN

